



KERJA SAMA INDONESIA - AUSTRALIA MELALUI PROGRAM MAMPU DALAM HAL KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Fayzah Anggana Abhirama, Ika Riswanti Putranti, Marten Hanura

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang Website:
<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Empowerment of women and gender equality is still major concern. This issue is still difficult to overcome due to the lack of public awareness about the importance of this issue in Indonesia. Seeing this, Australia, which has a higher awareness of women, invites cooperation with Indonesia through the MAMPU (Maju Perempuan for Poverty Reduction) Program. The collaboration aims to provide women with access to essential services and proper rights. By using liberal feminist theory and the concept of bilateral cooperation, this study has the main argument that the running of the capable program (2012-2020) has been running according to these theories and concepts. The findings of this study are that MAMPU Program has fulfilled liberal feminist theory by making women psychologically aware that they have rights and opportunities which also resulted in several legal changes in Indonesia regarding women, with this Indonesia-Australia cooperation has also run according to the concept of cooperation. bilateral because the response from both countries to the MAMPU Program was very good.

Keywords: Indonesia, Australia, MAMPU Program, Women in Poverty, Women's Empowerment, Gender Equality

PENDAHULUAN

Gender merupakan sebuah konsep yang memang selama ini dapat dikatakan pemicu ketidaksetaraan hubungan perempuan dan laki-laki, yang di mana selalu sisi perempuan ada pada status sosial yang di nilai lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tindakan diskriminasi pada perempuan adalah hal yang dapat kita ketahui sebagai melanggar hak asasi manusia, yang kemudian pemberdayaan perempuan sangat dibutuhkan supaya perempuan bisa mendapatkan memperjuangkan hak-haknya yang tidak diperbolehkan (Sudiarti et al., 2000).

Kesetaraan dapat dikatakan masih isu yang ramai terhadap di Indonesia. Menurut penelitian yang berjudul "Perempuan dan Kemiskinan", dikatakan bahwa rumah tangga adalah salah satu faktor adanya diskriminasi dan subordinasi pada perempuan dalam kesetaraan gender dan kemiskinan. Ketidakadilan dalam alokasi sumber daya rumah tangga memperlihatkan bahwa perempuan dengan laki-laki mempunyai tipe kemiskinan yang beda. Kemiskinan perempuan yang ada di dalam ruang publik selalu dihubungkan dengan ruang

tertutup bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam hal pengambilan keputusan (Indraswari, 2009).

Pentingnya masalah ini untuk para perempuan adalah ketidaksetaraan gender ini telah meningkatkan kemiskinan pada perempuan, dan begitu juga sebaliknya, kemiskinan itu sendiri memperburuk ketidaksetaraan gender. Wacana tentang kemiskinan tersebut tidak dapat menghilangkan masalah perbedaan oleh laki-laki dan perempuan miskin, karena kaum perempuan tersebut mereka miskin atau tidak miskin, mereka wajib pergi dengan bekal, yaitu pendidikan, ekonomi akses, dan lain-lain, berbeda dari laki-laki.

Dalam kasus-kasus tersebut telah membuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia untuk lebih memikirkan hal dalam cara untuk kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam ruang internasional, institusi RI ini telah kerja sama bersama melalui CSW (*The Commission on the Status of Women*). CSW tersebut adalah lembaga yang dibawah oleh ECOSOC (*United Nations Economic and Social Council*). CSW sendiri merupakan kepala badan antar-pemerintah global yang khususnya berkontribusi untuk memperkenalkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. CSW mempunyai peran yang penting dalam hal menawarkan hak-hak perempuan, dan membuat standar global atas kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Program MAMPU, n.d.). Indonesia sendiri telah membentuk kerja sama bersama dengan Australia karena menurut kedua negara ini kesetaraan gender ini adalah salah satu termasuk poin penting yang ingin diraih dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang kelima yaitu *gender equality*. Untuk kepentingan terhadap peningkatan akses terhadap perempuan terhadap pemerintah, Australia dan Indonesia membuat program untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yaitu, MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) (Sindo News, 2019).

Program MAMPU ini bergerak dalam peningkatan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, yang berguna untuk mengembangkan akses perempuan yang miskin di Indonesia pada layanan penting dan program pemerintah, dan membantu menciptakan tujuan pembangunan berkelanjutan. Program ini memiliki hubungan dengan 5 tema, yaitu menunjukkan akses perempuan miskin untuk melindungi dari sosial pemerintah, menunjukkan akses perempuan terhadap pekerjaan dan dihapusnya tindakan diskriminasi di wilayah tempat kerja, mengembangkan tenaga kerja perempuan yang ingin bekerja di luar negeri, mengembangkan perempuan untuk mempunyai reproduksi yang baik dan sehat, mengembangkan kepemimpinan perempuan untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan, bekerja sama dengan parlemen (BaKTI, n.d.).

Terdapat beberapa literatur tentang kerja sama Indonesia – Australia melalui Program MAMPU sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Yang pertama adalah Desi (2019) dengan judul “Kerja sama Australia-Indonesia melalui MAMPU dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia (2014-2018)” meneliti kerja sama apa saja yang dilaksanakan MAMPU terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah MAMPU telah berkembang dalam akses layanan, tetapi belum dapat mengurangi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Julita (2017) dengan judul “Kemitraan Indonesia-Australia melalui Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan) untuk Pemberdayaan Perempuan” meneliti keuntungan kemitraan dari tiap-tiap organisasi perempuan yang bekerja sama dengan Program MAMPU. Penelitian ini membuktikan bahwa sejak tahun 2012 sampai 2020 Program MAMPU berhasil untuk menaikkan tingkat pemberdayaan perempuan di Indonesia. Penelitian ketiga oleh Nasira (2017) berjudul “Pemberdayaan Perempuan melalui Program MAMPU (studi Kasus di Yayasan LP2EM Kota Parepare)”. Hasil penelitian tersebut adalah Yayasan LP2EM dapat memberikan dampak positif dalam berjalannya Program MAMPU di kota Parepare. Terakhir, Anissa (2019) dengan judul “Implementasi Program MAMPU Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Gender di Indonesia” meneliti tentang program MAMPU tersebut dan

menguraikan kesesuaian penerapan program ini sebagai instrumen kepentingan nasional Indonesia melalui program tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah Program MAMPU dapat membantu banyak perempuan di Indonesia untuk mengatasi permasalahan sosial melalui mitra yang ada.

Keempat tulisan di atas telah berhasil dalam membuktikan bahwa Program MAMPU berdampak positif dalam isu kekerasan dan pemberdayaan perempuan yang ada di Indonesia. Namun tidak ada yang berfokus kepada apakah keberhasilan Program MAMPU ini telah berjalan sesuai dengan teori feminis liberal dan konsep kerja sama bilateral. Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan perspektif baru dalam topik analisis kesesuaian Program MAMPU terhadap teori dan konsep tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang mewujudkan data deskriptif berbentuk ucapan atau tulisan dan tindakan yang dapat dipelajari dari subyek itu sendiri dan menekankan pada makna dibalik suatu fenomena (Lamont, 2015). Penulis berusaha untuk menjelaskan capaian-capaian pada Program MAMPU yang sesuai dalam teori feminis liberal dan konsep kerja sama bilateral. Selain itu penelitian ini juga hendak menganalisis kesesuaiannya. Dalam teori feminis liberal, Wollstonecraft berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama, sehingga dapat mengurangi kemiskinan terhadap perempuan. Pada Program MAMPU yang fokusnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dapat dipastikan bahwa perempuan yang mengikuti program tersebut secara tidak langsung disadari dan mendapatkan hak dan kesempatan yang seharusnya. Sedangkan dalam konsep kerja sama bilateral, setiap negara yang bersangkutan untuk menjalani kerja sama, wajib mempunyai strategi yang selaras dengan kepentingan kedua negara. Dalam kerjasama tersebut Australia dan Indonesia mempunyai hubungan yang baik, hubungan bilateral antara dua negara memiliki kesamaan dalam area prioritas, salah satunya adalah peningkatan kesetaraan gender. Kesetaraan gender tersebut selalu menjadi prinsip dan area prioritas yang sama bagi kedua negara. Tentunya, hal tersebut adalah cara Australia mempromosikan kepada Indonesia agar kerja sama bilateral dapat berjalan.

KERANGKA TEORI

Teori Feminis Liberal

Teori feminisme liberal ini pada awalnya tokoh pertama yang menciptakan teori tersebut adalah Mary Wollstonecraft tahun 1792 dalam bukunya yang berjudul "*A Vindication of the Rights of Women*" yang berpendapat bahwa rasionalitas, hukum kodrat dan keselarasan hak antara laki-laki dengan perempuan (Arivia, 2003). Pemikiran dari Wollstonecraft tersebut adalah pendapat feminis yang berada di Inggris pada saat pertama kali. Di sini Wollstonecraft menginginkan hak dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Menurut Wollstonecraft, jika hak dan kesempatan ini dibagikan maka perempuan akan bebas dari ketergantungan ekonomi sehingga bisa menghindari kemiskinan terhadap perempuan (Lubis, 2006). Teori ini digunakan untuk teori *gender equality* antara laki-laki dan perempuan, tentunya dengan menunjukkan perpindahan bagi hak-hak perempuan (Suhanjatisukri & Sri, 2002). Teoritis feminis di awal untuk mengemukakan ide bahwa para perempuan adalah makhluk yang sama dengan para laki-laki, dan tentunya juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

Teori feminisme liberal memperjuangkan bagaimana perempuan wajib mengikuti partisipasi dalam pembangunan. Mereka berpendapat bahwa keterbelakangan perempuan dari bagian ekonomi. Mereka membuat konsep, konsep ini adalah konsep yang akan menyertakan

perempuan, yang disebut sebagai *Women in Development*, diadakannya konsep ini karena mereka beranggapan bahwa perempuan dinilai menjadi masalah bagi perekonomian saat ini. Menurut pendapatnya, ketertinggalan perempuan salah satunya karena para perempuan dapat dikatakan tidak berpartisipasi politik maupun pembangunan. Hal tersebut membuat mereka melibatkan perempuan dalam proses sosial ekonomi dan program pembangunan sebagai cara untuk melibatkan kedudukan perempuan (Mosse, 1996).

Feminisme liberal memandang bahwa penindasan terhadap perempuan ini ada, karena para perempuan belum disediakan dapat melakukan haknya sebagai makhluk rasional dan bebas. Bagi kaum tersebut kebebasan muncul pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat, publik, kesempatan, dan hak bagi perempuan. Feminisme liberal dalam melawan masalah kemasyarakatan dirancang untuk mendorong persamaan kesempatan dan persamaan hak bagi setiap manusia, termasuk hak dan kesempatan perempuan. Kesempatan dan hak yang sama dengan laki-laki dan perempuan ini penting, dan oleh karena itu peluang antara laki-laki dan perempuan tidak perlu dibedakan (Faqih, 2006).

Ada dua cara untuk meraih feminisme liberal, pertama dengan meningkatkan kesadaran secara psikologis, antara lain dengan membahas pengalaman dari para perempuan dalam masyarakat yang mayoritasnya adalah laki-laki. Kedua, menginginkan reformasi hukum untuk keuntungan perempuan dan mengubah peraturan tersebut merupakan peraturan baru yang memperhatikan perempuan sama dengan laki-laki, yaitu hidup bersama dalam dasar kesetaraan (Yunahar & Ilyas, 1998).

Feminis liberal juga berpendapat bahwa sistem hukum terhadap perempuan merupakan hal yang terkadang menyebabkan perempuan terpinggirkan, maka dari itu, kesetaraan hanya dapat dicapai dengan membuat sistem hukum tidak terlalu bias terhadap perempuan (Rosyidin, 2020). Inti dari teori feminisme liberal ini adalah untuk menyakinkan perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

Dalam mewujudkan pencapaian hak dan kesempatan bagi perempuan, menyadarkan kesadaran psikologis hingga dihasilkannya aturan berupa undang-undang, adalah hal yang berat bagi sebuah negara untuk dilakukan karena kurangnya kemampuan dalam tata kelola. Oleh karena itu, dengan adanya kerja sama bilateral antara dua negara dapat membantu mewujudkan keadaan-keadaan yang seharusnya dimiliki oleh semua perempuan. Pada bagian selanjutnya, akan memaparkan tentang bagaimana kerja sama bilateral antara dua negara dapat dilakukan.

Konsep Kerja Sama Bilateral

Dalam buku yang berjudul “Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin” menurut Teuku May Rudy, dalam membangun kerja sama bilateral, masing-masing negara harus memiliki tujuan. Maka dari itu, setiap negara yang bersangkutan wajib menguraikan strategi yang selaras dengan kepentingan-kepentingan setiap negara (Rudy, 2002). Sedangkan, dalam buku yang berjudul “*Bilateral Diplomacy*” yang ditulis oleh Kishan S Rana, berpendapat bahwa “Dalam diplomasi bilateral konsep yang utama untuk dipakai merupakan suatu negara akan mengejar kepentingan nasionalnya untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dan caranya merupakan dengan membuat hubungan baik dan jangka panjang antar negara yang bersangkutan.” (Rana, 2002).

Berdasarkan politik internasional, kerja sama bilateral adalah situasi yang menciptakan adanya hubungan saling menguntungkan antar negara. Negara bersangkutan yang mengikuti kerja sama bilateral diharapkan untuk memiliki keuntungan dan juga dapat meningkatkan perdamaian di dalam negara masing-masing (Ramadhan, 2016).

Adapun acuan kerja sama bilateral yang melingkupi prosedur:

1. Respon dari negara yang menjadikan kerja sama
2. Persepsi dari pembuat keputusan di negara penerima

3. Aksi balik dari negara penerima keputusan
4. Persepsi dari pembuat keputusan dari negara yang menjadikan kerja sama (Perwita & Yani, 2005).

PEMBAHASAN

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang penting di Indonesia. Sedangkan dengan total penduduk yang banyak dan besar, Indonesia dapat dikatakan tidak bisa menghindari kesulitan-kesulitan tersebut. Kemiskinan merupakan tantangan yang sering dihadapi perempuan. Karena perempuan Indonesia masih merupakan demografis yang rentan dalam hal kemiskinan, pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada mereka dalam keadaan ini. Isu-isu perempuan termasuk kurangnya keterlibatan dalam angkatan kerja, partisipasi politik, dan pencapaian pendidikan relatif terhadap laki-laki.

Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat diukur dari tingkat kemiskinannya. Tingkat kemiskinan penduduk suatu daerah digunakan sebagai ukuran agregat untuk menentukan tingkat kesejahteraan daerah tersebut. Perubahan tingkat kemiskinan sering digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegagalan yang dinilai. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 meratifikasi konvensi CEDAW, salah satu konvensi perempuan. Keterbelakangan perempuan dapat terlihat dalam pembagian kerja yang berdasarkan gender, yang meletakkan perempuan di rumah dan laki-laki di tempat kerja.

Karena penguraian kerja secara seksual ini dapat mengkategorikan perempuan pada posisi subordinat atau terpinggirkan dari laki-laki, maka keinginan untuk mewujudkan perempuan sebagai peserta yang setara baik dalam rumah tangga atau dalam masyarakat dapat dicapai melalui sistem ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberdayaan perempuan agar tidak meminggirkan perempuan (UN Women). Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan tidak didasarkan pada konvensi ini.

Program MAMPU merupakan proyek kerja sama BAPPENAS dan DFAT untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Untuk membantu mengupayakan hak-hak perempuan miskin, program tersebut dimulai pada tahun 2012 dan diresmikan oleh perwakilan pemerintah Indonesia dan Australia. BAPPENAS mewakili Indonesia, dan DFAT bertanggung jawab untuk mewakili Australia. Dengan menurunkan dan meningkatkan ketahanan rumah tangga dalam melewati bencana yang tidak disengaja, seperti penyakit atau kecelakaan, perlindungan sosial dapat membantu mengurangi kemiskinan dan membantu masyarakat miskin agar tidak semakin terjerumus ke dalamnya. 14 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dicapai melalui langkah-langkah perlindungan sosial yang tepat (TPB atau SDGs). Untuk menjaga kesejahteraan penduduknya, pemerintah Indonesia telah mengembangkan skema jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dimulai pada tahun 2014. Selama pelaksanaan program, banyak perempuan yang terutama bekerja di sektor informal dan mereka yang tinggal di lokasi yang jauh, belum bisa memanfaatkannya. Khususnya pelayanan kesehatan reproduksi. Karena kurangnya bukti, mereka tidak dapat terlibat dalam kriteria, layanan, atau program yang bermanfaat.

AUSAID adalah donor utama untuk Program MAMPU, mereka memberikan sejumlah dana melalui mitra-mitra CSO Program MAMPU dan Pemerintah Indonesia. Dana ini bukan merupakan pinjaman, akan tetapi dana ini merupakan hibah yang akan dikelola untuk Program MAMPU. *United Nations, Australian Red Cross dan World Vision* bekerja sama dengan AUSAID untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan secara terkoordinasi. Program MAMPU AUSAID fokus terhadap gender dan pemberdayaan perempuan dengan cara yang penting. Disparitas ekonomi antara laki-laki dan perempuan mungkin berdampak pada keamanan dan regulasi negara. Orang miskin di negara berkembang juga berdampak pada pertumbuhan negara. AUSAID memperkirakan bahwa perempuan dalam posisi yang sama dibayar antara 10% dan 30% lebih rendah dari rekan laki-laki mereka. Upah perempuan dan

laki-laki naik 76% karena jumlah orang yang bekerja meningkat. Perempuan membentuk hanya 6% dari legislator di negara-negara Kepulauan Pasifik, dibandingkan dengan rata-rata global 23,3% (AusAid, 2012).

Partisipasi dalam SDGs merupakan komitmen yang dibuat oleh Australia yang merupakan negara maju (Australian Government, 2016). Berinvestasi dalam pembangunan negara lain dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap keamanan Australia di dunia yang semakin saling bergantung. 8 Dari 17 tujuan, Australia telah berpartisipasi dalam menawarkan tujuan yang terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Khususnya Program MAMPU ada di SDGs nomor 1 (Tanpa Kemiskinan), 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), dan 5 (Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Selain SDGs, juga ada di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

Menjelang akhir tahun 2012, Australia dan Indonesia mulai bekerja sama untuk memerangi kemiskinan berbasis gender. Dalam sebuah pernyataan, Duta Besar Australia Indonesia yaitu, Greg Moriarty, mencatat bahwa strategi bantuan Australia memprioritaskan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Beliau berkata “Menyadari bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang mempengaruhi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia, Australia berkomitmen untuk mendukung dan bermitra dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan” (Kedutaan Besar Australia Indonesia, 2014).

Maka dari itu, Australia dan Indonesia bekerja sama melalui Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). Dalam kerja sama tersebut Australia membantu pemerintah Indonesia mengatasi dan membantu pengentasan kemiskinan dengan memberikan peluang ekonomi dan menjangkau perempuan miskin melalui program dan layanan publik (Kedutaan Besar Australia Indonesia, 2013).

Program MAMPU

Program MAMPU Tahap I yang diluncurkan pada April 2013 di bawah perjanjian anak perusahaan yang ditandatangani pada tahun 2013. Perempuan miskin dan kelompok yang mengkampanyekan hak adalah fokus dari perjanjian ini. Penandatanganan kesepakatan antara Australia dan Indonesia pada 25 Januari 2017 untuk melaksanakan Program MAMPU Tahap II (Juli 2016- Desember 2020) dengan tujuan meningkatkan partisipasi perempuan Indonesia dalam administrasi dasar dan program pemerintah lainnya dalam rangka untuk mendapatkan kesepakatan gender di Pemerintah. Dukungan terhadap pemberdayaan perempuan Indonesia dan kesetaraan gender di Australia ditunjukkan oleh pemerintah Australia dalam komunikasinya dengan organisasi pemberdayaan perempuan Indonesia.

Program MAMPU ini bertujuan dalam peningkatan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, yang berguna untuk mengembangkan akses bagi para perempuan miskin di Indonesia untuk mendapatkan layanan penting dan program pemerintah, dan membantu menciptakan tujuan pembangunan berkelanjutan. Program ini memiliki hubungan dengan lima area tematik, pertama adalah peningkatan akses perlindungan sosial. Kedua, perbaikan kondisi kerja. Ketiga, perlindungan buruh migran. Keempat, peningkatan kesehatan dan gizi perempuan. Kelima, pengurangan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam hal pemberdayaan, kehidupan perempuan dapat berkembang dari kondisi kekuasaan dan akses terbatas ke kondisi di mana kekuasaan dan agensinya lebih ditingkatkan daripada sebelum dia dipekerjakan untuk mengelola Program MAMPU. Perempuan dapat memperoleh akses ke lima aset di tingkat individu sebagai hasil dari proses pemberdayaan. Di antara aset-aset ini adalah perubahan dalam keterampilan, pengetahuan, dan harga diri seseorang. Selain uang dan sumber daya lainnya, MAMPU juga memberikan akses kepada perempuan kurang mampu ke berbagai aset lain, seperti modal manusia dan bantuan sosial.

Atas permintaan Program MAMPU, diberikan bantuan tunai dan teknis kepada 13 mitra penting yang dipilih melalui proses yang kompetitif. Mereka bekerja sama dengan jaringan 100 kelompok lokal yang beroperasi di 944 desa di 154 kabupaten/kota di 27 provinsi Indonesia untuk melaksanakan kegiatan MAMPU. Operasi MAMPU dilaksanakan di 27 provinsi di Indonesia oleh jaringan 100 organisasi lokal yang ada. Misalnya, kelompok perempuan lokal dan pengorganisasian masyarakat, komite yang dibentuk untuk menyatukan layanan tertentu, kolaborasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, program pendidikan keaksaraan orang dewasa, advokasi atas nama pemerintah daerah atau lokal melalui forum multi-stakeholder dengan media, pendampingan. Dan pelatihan pemimpin perempuan merupakan bagian dari upaya Program MAMPU untuk memberdayakan perempuan (Damayanti, 2019).

Untuk mencapai tujuannya dalam lima area tematik, MAMPU bertumpu terhadap keyakinan bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah tujuan dan cara untuk mencapainya. Ketika perempuan diberi kesempatan untuk mengekspresikan preferensi dan pengaruh mereka, akses yang lebih besar ke layanan akan dicapai sebagai hasil dari menempatkan mereka di pusat pembangunan dan upayanya. MAMPU Indonesia mengakui dan mendukung inisiatif dalam program yang membantu menciptakan kesempatan penting untuk perubahan transformatif, yang memiliki tujuan utama dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Inisiatif baru oleh Program MAMPU ini bermaksud untuk membantu gerakan perempuan secara keseluruhan, serta kelompok-kelompok di kawasan dan di seluruh dunia, membangun jaringan yang lebih kuat dan mengatasi kebutuhan lokal dan global yang mendesak. MAMPU juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi organisasi mitra dan sub-mitra MAMPU dengan membina sinergi dan meningkatkan keterampilan antar organisasi mitra dan sub-mitra MAMPU dalam rangka pemberdayaan perempuan lokal. Dengan adanya gagasan lembaga yang bekerja sama dengan MAMPU sebagai bagian dari pemerintah Indonesia yang dilindungi oleh mitranya, hal ini sesuai dengan konsep kemitraan. Oleh karena itu, pemerintah dan yang melaksanakan program harus menjalin kemitraan dengan mitra yang harus sesuai dengan tiga prinsip kemitraan, yaitu transparansi, saling menguntungkan, dan akuntabilitas.

Maka dari itu, perempuan diperkirakan akan berperan aktif dalam pengambilan keputusan komunal dan akan melaksanakan perbaikan secara progresif. Bidang MAMPU lainnya bersifat lintas sektoral, namun tidak terkait langsung dengan tema utama, dan memiliki keterkaitan yang cukup signifikan dengan isu-isu perempuan. Termasuk di dalamnya adalah isu-isu seperti pernikahan anak dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta partisipasi perempuan dalam proses legislatif dan koalisi MAMPU. Penting agar MAMPU dan mitranya sebagai staf yang melaksanakan untuk memiliki kompetensi yang berkualitas sesuai dengan peran yang dibutuhkan dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan melalui lima bidang tematik, sehingga struktur organisasinya jelas terimplementasi di mana MAMPU dan mitranya sebagai yang melaksanakan untuk memiliki kompetensi yang berkualitas.

Kategori Mitra dengan Area Tematik Program MAMPU

| NO | Mitra Program MAMPU | Area Tematik Program MAMPU |
|----|---|--|
| 1. | PEKKA, KAPAL Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia | Meningkatkan Akses terhadap Program Perlindungan Sosial |
| 2. | TURC (<i>Trade Union Rights Centre</i>), Bitra Indonesia, Yayasan Annisa Swasti | Meningkatkan Kondisi Pekerjaan dan Menghapuskan Diskriminasi di Tempat Kerja |

| | | |
|----|--|---|
| 3. | Migrant Care | Meningkatkan Kondisi Migrasi Buruh Perempuan ke Luar Negeri |
| 4. | Aisyiyah, Yayasan Kesehatan Perempuan, PERMAMPU | Meningkatkan Status Kesehatan dan Gizi Perempuan |
| 5. | Forum Pengada Layanan, KOMNAS Perempuan, BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) | Mengurangi Kekerasan terhadap Perempuan |

Sumber: Website Resmi Program MAMPU – BAPPENAS
<http://mampu.bappenas.go.id/>

Analisis Kesesuaian Program MAMPU Berdasarkan Teori Feminis Liberal dan Konsep Kerja Sama Bilateral

Penelitian ini telah sesuai dengan argument yang dibawa oleh penulis, yaitu Penelitian ini berargument bahwa Program MAMPU telah berjalan sesuai teori feminis liberal karena dapat membuat perempuan sadar secara psikologis bahwa mereka memiliki hak dan kesempatan dan juga menghasilkan beberapa perubahan hukum di Indonesia tentang perempuan. Di sisi lain, dengan tercapainya tujuan dalam Program MAMPU ini telah berhasil mewujudkan kerja sama antara Indonesia dengan Australia sesuai dengan konsep kerja sama bilateral. Pada teori feminis liberal, Wollstonecraft berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama, sehingga dapat mengurangi kemiskinan terhadap perempuan (Lubis, 2006). Dalam Program MAMPU, mereka memiliki lima area tematik yang beragam dengan tujuan untuk mengembangkan akses bagi perempuan miskin di Indonesia untuk mendapatkan layanan penting dan program pemerintah, dan membentuk menciptakan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut, perempuan yang mengikuti program-program yang ada dalam Program MAMPU dapat memperoleh akses ke lima area yang dikelola Program MAMPU dengan fokus terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Program tersebut meliputi perubahan dalam keterampilan, pengetahuan, dan meningkatkan martabat para perempuan miskin di Indonesia. Selain uang dan sumber daya lainnya, Program MAMPU juga memberikan akses kepada perempuan ke berbagai program lain, seperti bantuan sosial.

Dalam konsep *Women in Development*, berpendapat bahwa perempuan harus berpartisipasi pada program pembangunan sehingga dapat membebaskan perempuan dalam keterbelakangannya dari sisi ekonomi (Mosse, 1996). Dalam kelima area tematik Program MAMPU selalu selaras dengan SDGs nomor 1 (Tanpa Kemiskinan), 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), dan 5 (Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan juga RPJMN 2015-2019 yang salah satunya adalah untuk melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan tempat kerja yang aman bagi mereka pada khususnya dalam memperbaiki kondisi pekerja asing berupah rendah, dan perawatan kesehatan yang layak dapat dijangkau oleh perempuan di Indonesia, terutama bagi mereka yang miskin atau yang masih muda, serta pengurangan kekerasan terhadap perempuan.

Ada dua cara menurut teori feminis liberal untuk para perempuan mencapai kesetaraan gender, yang pertama dengan meningkatkan kesadaran secara psikologis, yang kedua perempuan tersebut menginginkan perubahan hukum untuk keuntungan dirinya sendiri (Yunahar & Ilyas, 1998). Dalam wawancara bersama Ibu Tria selaku Koordinator Area Tematik 1 dan 4 Program MAMPU, beliau mengatakan bahwa perempuan yang mengikuti program disini pada awalnya banyak yang tidak sadar bahwa mereka layak mendapatkan akses-akses yang dibawa oleh Program MAMPU, seiring berjalannya waktu MAMPU berjalan

perempuan berhasil diberdayakan. Selama delapan tahun berjalan Program MAMPU juga berhasil mendorong beberapa peraturan hukum, diantaranya:

1. Area 1
 - Penyertaan penyandang disabilitas secara otomatis terqualifikasi dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan untuk mengakses JKN-PBI.
 - Pengesahan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
 - Pengesahan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, termasuk perlindungan dan akses bagi program pemerintah untuk mendukung perempuan nelayan.
 - Pengesahan peraturan daerah: meningkatkan akses perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas Bengkulu, Padang, dan Makassar 2016-2018.
 - Mengadvokasi kebijakan Layanan Identitas Hukum (Peraturan Desa tentang Itsbat Nikah, Dana Sosial, dan Kesehatan).
 - Bupati Kabupaten Sukabumi berhasil menandatangani peraturan untuk menggabungkan layanan KLIK PEKKA ke dalam sistem SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) dengan tujuan untuk mengembangkan data dan akses perlindungan sosial.
2. Area 2
 - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) berganti nama menjadi Ranperda Ketenagakerjaan dan masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2018.
3. Area 3
 - Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).
4. Area 4
 - Mengadvokasi Peraturan Presiden Pengganti UU (Perppu) tentang pencegahan perkawinan anak.
 - Mengadvokasi Forum Multi Stakeholder (FMS) melalui One Stop Service and Learning (OSSL) telah bergabung dengan pemenuhan hak perempuan dalam bentuk peraturan adat dan alokasi anggaran.
5. Area 5
 - Mengadvokasi untuk pengesahan Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
 - RUU PKS berhasil masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas di DPR sejak tahun 2016.
 - Mengadvokasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 (Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan di Kabupaten Timor Tengah Selatan) dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 (Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan di Ambon).

Feminis liberal juga berpendapat bahwa sistem hukum terhadap perempuan merupakan hal yang terkadang menyebabkan perempuan terpinggirkan, maka dari itu, kesetaraan hanya dapat dicapai dengan membuat sistem hukum tidak terlalu bias terhadap perempuan (Rosyidin, 2020). Pada Program MAMPU dapat dilihat bahwa sudah menghasilkan beberapa produk hukum berdasarkan pemaparan di atas. Dalam mewujudkan pencapaian hak dan kesempatan

pada perempuan, lalu dengan menyadarkan kesadaran psikologis serta menginginkan reformasi hukum yang menguntungkan untuk perempuan itu sendiri, dalam kesesuaian terhadap teori feminis liberal dapat terpenuhi. Maka dari itu, dengan adanya kerja sama bilateral suatu negara yaitu Indonesia dan Australia dalam Program MAMPU dapat terwujud.

Dalam konsep kerja sama bilateral, setiap negara yang bersangkutan untuk menjalani kerja sama, wajib mempunyai strategi yang selaras dengan kepentingan kedua negara (Rudy, 2002). Lalu, dengan mengejar kepentingan nasional untuk mendapatkan keuntungan yang besar, agar dapat meningkatkan perdamaian di dalam negara masing-masing (Rana, 2002), Australia dan Indonesia mempunyai hubungan yang baik, hubungan bilateral antara dua negara memiliki kesamaan dalam area prioritas, salah satunya adalah peningkatan kesetaraan gender. Kesetaraan gender tersebut selalu menjadi prinsip dan area prioritas yang sama bagi kedua negara. Tentunya, hal tersebut adalah cara Australia mempromosikan kepada Indonesia agar kerja sama bilateral dapat berjalan.

Menurut konsep kerja sama bilateral, ada empat acuan yang melingkupi prosedur kerja sama bilateral (Perwita & Yani, 2005). Pertama adalah respon dari negara yang menjadikan kerja sama, yaitu Australia. Karena selarasnya tujuan Australia dan Indonesia dalam hal kesetaraan gender, maka kerja sama antara kedua negara tersebut dapat terjalin. Oleh karena itu, Australia merespon kerja sama ini dengan dukungan yang mereka berikan berupa dana hibah, bantuan teknis para ahli dari Australia, dan bantuan untuk memperluas jejaring yang ada. Dengan wawancara terhadap Ibu Tria, beliau menyampaikan bahwa secara finansial, Program MAMPU mendapatkan hibah dari AUSAID sebanyak AUD 112,3 Juta. Hibah tersebut dibagikan kepada mitra yang menjadi bagian dalam Program MAMPU. Pertama, dana hibah dengan memberikan dana kepada mitra lokal yang terpilih yang akan bekerja dalam Program MAMPU. Kedua, pemberian bantuan teknis, misal dalam hal konsultan, yang bertujuan agar mitra-mitra MAMPU dapat bekerja dengan baik. MAMPU fleksibel dalam memberikan kesempatan kepada mitra untuk memastikan program dapat berjalan dengan baik. Ketiga, *expanding network*, dikarenakan mitra perlu adanya *networking* atau jejaring dengan stakeholder yang lain.

Acuan yang kedua adalah persepsi dari pembuat keputusan di negara penerima, dengan wawancara kepada Ibu Ayun selaku koordinator kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Bappenas, beliau mengatakan bahwa respon Indonesia melihat kerja sama melalui Program MAMPU tentunya menyambut dengan baik, semua kerja sama yang ditawarkan pemerintah Australia dan Indonesia pasti disambut dengan baik. Akan tetapi memang ada beberapa catatan yang dikerjasamakan harus dengan kebijakan prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terdapat dalam RPJMN, dan mendukung SDGs 2030. Program MAMPU telah membawa RPJMN 2015-2019 dan SDGs nomor 1,3,5,8.

Dalam acuan yang ketiga, yaitu aksi balik dari negara penerima keputusan. Langkah yang diambil Indonesia sebagai tindakan dalam menindak lanjuti kerja sama ini adalah memastikan berjalannya Program MAMPU. Dengan adanya MAMPU, maka dapat mengisi kekosongan serta memastikan bahwa kebijakan di pusat benar-benar dapat terlaksana sampai di tingkat daerah serta sampai di tingkat masyarakat langsung. Dalam setiap tahunnya, mitra-mitra ini diberikan dana anggaran untuk menjalankan programnya dan juga tiap tahun memberikan laporan keuangannya. MAMPU memantau keberhasilannya dan target-target yang akan dicapai dari laporan tersebut, jika ada mitra yang tidak sampai memenuhi target, pemberian finansialnya akan disesuaikan dengan target berikutnya. Sedangkan secara teknis, Program MAMPU memberikan bantuan-bantuan dengan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan, yang pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Dari mitra itu sendiri mereka dapat mengembangkan kapasitas terkait dengan isu-isu tertentu, dan dari MAMPU dapat memastikan ketika ada transfer knowledge berarti kemungkinan besarnya adalah program berhasil tercapai dengan baik.

Selanjutnya dalam acuan keempat, yaitu persepsi dari pembuat keputusan dari negara yang menjadikan kerja sama. Setelah melihat pencapaian Program MAMPU, diantaranya, berhasil meningkatkan akses perempuan miskin untuk mendapatkan pelayanan melalui beberapa kegiatan, berhasil mendorong berbagai advokasi kebijakan untuk pekerja rumahan, berhasil adanya program Desa Peduli Buruh Migran yang dapat memastikan bahwa pekerja buruh migran bisa mendapat akses layanan yang baik, berhasil meningkatkan akses untuk kesehatan dan diakui oleh pemerintah daerah, berhasil mencapai kemajuan pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan bekerja sama dengan beberapa lembaga di daerah. Dengan hal tersebut, MAMPU berhasil berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan pada level mikro, berhasil membuka awareness pada perempuan miskin di Indonesia. Dalam konferensi Pengakhiran MAMPU, Allester Cox sebagai Charge d’Affaires Kedutaan Besar Australia, beliau mengungkapkan “Harapan kami, kerja sama ini dapat terus berlanjut dalam agenda penting bersama tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berikutnya.” Artinya, respon dari Australia dalam mengakhiri program tersebut adalah baik. Maka dari itu, setelah Program MAMPU selesai, Australia tetap menginginkan melanjutkan dengan Program Inklusi. Inklusi adalah program lanjutan untuk kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Sasaran program Inklusi tersebut diperluas, yaitu mencakup perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan.

Melalui Program MAMPU Australia dan Indonesia mendukung para perempuan di Indonesia (khususnya perempuan yang terpinggirkan) yang akan memajukan kepemimpinan dan memperbesar akses di semua bidang dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terkait isu-isu. Contoh komitmen Pemerintah Australia terhadap kesetaraan gender di Indonesia adalah program MAMPU.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab rumusan masalah “Bagaimana kesesuaian kerja sama Indonesia dengan Australia selama menjalankan program MAMPU di Indonesia berdasarkan teori feminis liberal dan konsep kerja sama bilateral?” dengan membawa kerangka pemikiran yaitu teori feminis liberal, dan konsep kerja sama bilateral. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kerja sama yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia melalui Program MAMPU telah sesuai dalam teori feminis liberal dan konsep kerja sama bilateral.

Terdapat beberapa alasan mengapa kerja sama tersebut sudah memiliki kesesuaian, diantaranya adalah Program MAMPU sudah membantu perempuan di Indonesia dengan mendapatkan hak dan kesempatannya melalui dua cara, yaitu dengan meningkatkan kesadaran psikologis perempuan, dan menginginkan perubahan hukum yang menguntungkan perempuan tersebut. Selama delapan tahun berlangsung Program MAMPU berhasil dalam meningkatkan kesadaran perempuan melalui program-program yang ada, yang menghasilkan beberapa peraturan di Indonesia. Dengan hal tersebut, Australia dan Indonesia juga berhasil dalam kerja sama tersebut dikarenakan respon dari kedua negara terhadap Program MAMPU sangat baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ika Riswanti Putranti, SH, MH, Ph.D. selaku dosen pembimbing 1, Bapak Marten Hanura, S.IP., MPS. selaku dosen pembimbing 2, serta Ibu Dr. Dra. Rr. Hermeni Susiatiningsih, M.Si. sebagai dosen penguji yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada Penulis sehingga jurnal penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

Arivia, G. (2003). *Filsafat Berperspektif Feminis*. Yayasan Jurnal Perempuan.

- AusAid. (2012). *Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction. Program Design Document Part A: Situational Analysis & Program Overview*. Australian Government.
- Australian Government. (2016). *Gender equality and women's empowerment strategy*. Department of Foreign Affairs and Trade.
- BaKTI. (n.d.). *Program Yang Telah Selesai*. Retrieved April 15, 2021, from <https://www.bakti.or.id/program-yang-telah-selesai>
- Damayanti, A. (2019). *Implementasi Program MAMPU sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Gender di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Faqih, M. (2006). *Analisis Gender dan Transformasi Social*. Pustaka Pelajar.
- Indraswari. (2009). Perempuan dan Kemiskinan. *Perempuan Dan Kemiskinan*, 14. <https://media.neliti.com/media/publications/545-ID-perempuan-dan-kemiskinan.pdf>
- Kedutaan Besar Australia Indonesia. (2013). *Australia Berkomitmen untuk Menurunkan Kemiskinan di Indonesia*. https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM13_017.html
- Kedutaan Besar Australia Indonesia. (2014). *Australia dan Indonesia Bermitra untuk Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan*. https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM14_042.html
- Lamont, C. (2015). *Research Methods In International Relations*.
- Lubis, A. (2006). *Deskonstruksi Epitimologi Modern dari Postmodernisme Teori Kritis Post Kolonialisme hingga Cultural Studies*. Pustaka Indonesia Satu.
- Mosse, J. (1996). *Gender dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar.
- Perwita, & Yani. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Remaja Rosdakarya.
- Program MAMPU. (n.d.). *Tentang Kami - MAMPU*. Retrieved August 20, 2020, from <https://www.mampu.or.id/tentang-kami/>
- Ramadhan, I. (2016). *Kerjasama Bilateral Jepang-Indonesia dalam Bidang Sosial dan Budaya*. Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Rana, K. S. (2002). *Bilateral Diplomacy*. Manas Publications.
- Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional dari Perspektif Klasik sampai Non-Barat*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Rudy, T. M. (2002). *Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. PT. Refika Aditama.
- Sindo News. (2019, October 9). *Indonesia-Australia Berdayakan Perempuan lewat Program MAMPU*. <https://ekbis.sindonews.com/berita/1447009/34/indonesia-australia-berdayakan-perempuan-lewat-program-mampu>
- Sudiarti, Luluhima, A., Irianto, S., & Ihromi, T. O. (2000). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Penerbit Alumni.
- Suhanjatisukri, & Sri. (2002). *Pemahaman Islam dan Tantangan dan Keadilan Gender*. Gama Media.
- Yunahar, & Ilyas. (1998). *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik dan Kontemporer*. Pustaka Pelajar.